

**RATIO DECIDENDI PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 100/PUU-XIII/2015 TENTANG
PENETAPAN CALON TUNGGAL DALAM PEMILU
KEPALA DAERAH**

TESIS

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mencapai Gelar Magister Hukum**



Oleh :

**IMAM HIDAYAT
NIM. 1321600013**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2018**

**RATIO DECIDENDI PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 100/PUU-XIII/2015 TENTANG
PENETAPAN CALON TUNGGAL DALAM PEMILU
KEPALA DAERAH**

TESIS

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mencapai Gelar Magister Hukum**



Oleh :

**IMAM HIDAYAT
NIM. 1321600013**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2018**

TESIS

**RATIO DECIDENDI PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 100/PUU-XIII/2015 TENTANG
PENETAPAN CALON TUNGGAL DALAM PEMILU
KEPALA DAERAH**

Diajukan oleh :

**IMAM HIDAYAT
NIM. 1321600013**


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus
Pada ujian Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada tanggal : 12 Februari 2018
Tim Penguji:

Prof. Dr. Made Warka, SH., M.Hum
Ketua

Dr. Hj. Endang Prasetyawati, SH., M.Hum
Anggota

Dr. Fajar Sugianto, SH., MH
Anggota

Mengesahkan,
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dekan,


Dr. Slamet Suhartono, SH., MH

TESIS

**RATIO DECIDENDI PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 100/PUU-XIII/2015 TENTANG
PENETAPAN CALON TUNGGAL DALAM PEMILU
KEPALA DAERAH**

Diajukan oleh :

**IMAM HIDAYAT
NIM. 1321600013**

**Telah disetujui oleh Pembimbing untuk diuji
Surabaya, 27 Januari 2018**

**Prof. Dr. Made Warka, SH., M.Hum
Pembimbing I**



**Dr. H. Hufron, SH., MH
Pembimbing II**



PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : IMAM HIDAYAT
NIM : 13.216.0.0013
Program : Magister Hukum
Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa “Tesis” yang saya buat dengan judul:

RATIO DECIDENDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
100/PUU-XIII/2015 TENTANG PENETAPAN CALON TUNGGAL DALAM
PEMILU KEPALA DAERAH

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan “Duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia TESIS ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 27 Januari 2018

Hormat saya,



Imam Hidayat
Imam Hidayat

**PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa:

Nama : IMAM HUAYAT
Nomor Mahasiswa : 1321600013

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :
RATIO DECIDENDI PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 100/PUU-XIII/2015 TENTANG
PENETAPAN CALON TUNGGAL DALAM PEMILU KEPALA DAERAH.
beserta perangkat yang diperlukan (bila ada).

Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Surabaya
Pada tanggal : 5 Desember 2018
Yang menyatakan



(IMAM HUAYAT)

RINGKASAN

Dalam perkembangannya pemilu kepala daerah menimbulkan persoalan di tengah masyarakat. Pemilu selama ini menampilkan beberapa bakal calon untuk berkompetisi guna menjadi kepala daerah. Namun persoalannya akan terasa ketika dalam pendaftaran bakal calon hanya terdiri atas satu pasangan calon saja. Fenomena ini telah terjadi di berbagai daerah yang menyelenggarakan pemilu serentak. Sehingga beberapa pihak dari golongan tertentu mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan uji materi UU No. 8 Tahun 2015 yang di dalamnya menyatakan sekurang-kurangnya 2 (dua) pasangan calon. Berdasarkan kronologis tersebut dapat dikatakan bahwa telah terjadi pertentangan hukum, dalam hal ini pertentangan UU No. 8 Tahun 2015 dengan UUD NRI 1945 sehingga harus diputuskan terciptanya kepastian hukum.

Mahkamah Konstitusi selanjutnya mengeluarkan putusan Nomor 100/PUU-XIII/2015 mengabulkan gugatan pemohon yang pada pokoknya menetapkan daerah yang memiliki satu pasangan calon untuk ikut dalam Pemilu Kepala Daerah. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat diambil rumusan masalah yaitu : apa dasar pertimbangan dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 tentang Penetapan calon tunggal dalam pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dalam Pemilihan Kepala Daerah; dan bagaimana mekanisme Penerapan Calon Tunggal dalam pemilihan umum kepala daerah. Tesis ini menggunakan penelitian yuridis normatif karena menitikberatkan pada penelitian kepustakaan yang intinya meneliti asas- asas hukum, sistematis hukum, dan sinkronisasi hukum dengan cara menganalisanya. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif

Pembahasan dasar pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 100/PUU-XIII/2015 memiliki beberapa sudut pandang. Dalam hal ini majelis hakim menggunakan pertimbangan sosiologis; pertimbangan teoritis, pertimbangan yuridis, dan filosofis dalam memutuskan perkara. Selanjutnya pembahasan mengenai mekanisme terkait persyaratan telah diatur dalam Pasal 54C ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 serta prosedur calon tunggal dapat dilakukan dengan menggunakan surat suara yang berisi pasangan calon dan gambar kosong sebagaimana di atur dalam Pasal 54C ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016.

Kata Kunci : Ratio Decidendi, Calon Tunggal, Putusan Mahkamah Konstitusi, Pemilu Kepala Daerah

ABSTRACT

In the development of the election of regional heads cause problems in the community. Election has been showing some candidates to compete to become regional head. But the problem will be felt when the registration of candidates will only consist of one candidate pair only. This phenomenon has occurred in various regions conducting simultaneous elections. So some parties from certain groups filed a lawsuit to the Constitutional Court for the judicial review of Law no. 8 of 2015 in which it states at least 2 (two) candidate pairs. Based on the chronology can be said that there has been legal contradictions, in this case the contradiction of Law no. 8 of 2015 with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia so that it must be decided the creation of legal certainty.

The Constitutional Court further issued the decision Number 100 / PUU-XIII/2015 to grant the applicant's lawsuit, which principally stipulates the region having one candidate pair to participate in the Regional Head Election. Based on the description, it can be taken the formulation of the problem, namely: what is the basic consideration of the issuance of the decision of the Constitutional Court Number 100 / PUU-XIII / 2015 on the Stipulation of a single candidate in the election of Governor, Regent and Mayor in the Regional Head Election; and how the mechanism of Single Candidate Implementation in the general election of regional head. This thesis uses normative juridical research because it focuses on literature research that essentially examines the principles of law, systematic law, and legal synchronization by way of analyzing it. The data obtained were analyzed by qualitative descriptive method

The discussion on the basis of judges' consideration in Decision Number 100 / PUU-XIII / 2015 has several points of view. In this case the panel of judges uses sociological considerations; theoretical considerations, juridical considerations, and philosophy in deciding cases. Furthermore, the discussion on the mechanism related to the requirements has been regulated in Article 54C paragraph (1) of Law no. 10 Year 2016 and single candidate procedure can be done by using ballots containing candidate pairs and blank drawings as stipulated in Article 54C paragraph (2) of Law no. 10 Year 2016.

Keywords: Decidendi Ratios, Single Candidates, Decisions of the Constitutional Court, Regional Head Elections

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan HidayahNya sehingga penulisan tesis yang berjudul Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Penetapan Calon Tunggal Dalam Pemilu Kepala Daerah telah selesai. Tesis ini dapat terselesaikan karena tidak lepas dari dukungan dan bantuan dari segenap pihak, baik moril maupun materiil. Atas dukungan dan bantuan tersebut, maka ucapan terima kasih dan hormat penting Penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Made Warka., SH., MHum, selaku dosen pembimbing sekaligus penguji tesis yang senantiasa memberikan bimbingan dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan.
2. Dr. Slamet Suhartono., SH., MHum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Dr. Fajar Sugianto., SH., MHum, selaku Kepala Program Studi S-2 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Dr. Hufron., SH., MH, selaku dosen pembimbing, yang senantiasa memberikan bimbingan dan pemahaman dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan.
5. Dr. Endang Prasetyawati., SH., MH selaku dosen penguji tesis yang mana telah memberikan arahan untuk penyempurnaan tesis ini.
6. Drs. Harsono, selaku Kepala SMA Muhammadiyah 1 Surabaya yang mana telah memberikan kesempatan dan dukungan untuk menyelesaikan kuliah ini.
7. Bapak/Ibu Guru Pengajar SMA Muhammadiyah 1 Surabaya yang telah memberikan dukungan baik moril dan spiritual.
8. Ibu Aminah, selaku orang tua yang tidak henti-hentinya mendoakan guna kelancaran mulai dari awal perkuliahan hingga penulisan tesis.
9. Istriku Dian Aristia Dewi yang memberikan segalanya untuk terlaksananya tesis ini dengan baik serta putra-putriku Anisah Rahma Hidayat dan Hafidz Hamzah Hidayat yang masih duduk di bangku sekolah.
10. Semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung memberikan motivasi, pandangan dan segala sesuatunya untuk kelancaran dalam penyelesaian tesis ini.

Surabaya, 12 Pebruari 2018
Penulis,

Imam Hidayat

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Pengesahan	ii
Lembar Tim Penguji	iii
Pernyataan Keaslian Tesis	iv
Kata Pengantar	v
Abstract	vi
Daftar Isi	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Orisinalitas Penelitian	9
1.5.1. Penelitian Terdahulu	9
1.5.2. Kajian Penelitian Terdahulu	11
1.6. Metode Penelitian	12
1.6.1 Tipe Penelitian	12
1.6.2 Pendekatan Masalah	12
1.6.3 Jenis dan Bahan Hukum	14
1.6.4 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	15
1.6.5 Analisis Bahan Hukum	16
1.6 Pertanggungjawaban Sistematis	16
BAB II LANDASAN TEORI DAN PENJELASAN KONSEP	18
2.1 Landasan Teori	18
2.1.1. Teori Tujuan Hukum	18
2.1.2. Teori Hukum Responsif	24
2.1.3. Teori Demokrasi	27
2.2 Penjelasan Konsep	30
2.2.1. Konsep Ratio Decidendi	30
2.2.2. Konsep Calon Tunggal	32
2.2.3. Konsep Pemilu Kepala Daerah	33
BAB III RATIO DECIDENDI PUTUSAN MK NOMOR 100/PUU- XII/2015 TENTANG CALON TUNGGAL DALAM PEMILU KEPALA DAERAH	37
3.1. Pertimbangan Sosiologis	44
3.2. Pertimbangan Teoritis	57
3.3. Pertimbangan Yuridis	57
3.4. Pertimbangan Filosofis	59
BAB IV Mekanisme Penerapan Calon Tunggal Dalam Pemilu Kepala Daerah	65
4.1. Syarat Calon Tunggal Dalam Pemilu Kepala Daerah	65

4.2. Prosedur Penerapan Calon Tunggal Dalam Pemilu Kepala Daerah	68
BAB V PENUTUP	74
4.1 Kesimpulan	74
4.2 Saran	75
DAFTAR BACAAN	